



MENDAFTAR:
Orang tua calon siswa mengisi formulir pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP di SMPN 15, Kota Jogja, kemarin (19/6).

Banyak Temukan Status Famili Lain di KK

FORUM Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja masih menemukan status "famili lain" pada kartu keluarga (KK) calon siswa. Anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba mengatakan, modus itu didu-

ga untuk mempermudah calon siswa dari luar Kota Jogja agar bisa diterima di SMP negeri yang diinginkan. "Dari dua sekolah yang dipantau untuk jalur zonasi yakni SMPN 8 dan SMPN 5 Jogja,



kasus dengan modus 'famili lain' masih ditemukan," ujar Kamba kemarin (19/6).
 ▶ Baca *Banyak...* Hal 7

Banyak Temukan Status Famili Lain di KK

Sambungan dari hal 1

Ia juga mengatakan, sama dengan PPDB tahun sebelumnya, kasus seperti ini masih terulang. Meskipun tanggal diterbitkan KK itu sudah satu tahun.

"Menariknya, fenomena status 'famili lain' sebaran domisilinya dekat dengan sekolah-sekolah unggulan. Seperti di SMPN 5 dan SMPN 8 Kota Jogja," katanya.

Modus lain casis diduga pisah KK. Seperti ada seorang perempuan dengan status kawin tercatat, statusnya sebagai kepala keluarga. Namun dalam KK tidak terdapat suaminya. "Hanya ada perempuan itu dan dua anaknya. Hal ini kami temukan di SMPN 5 Jogja," bebernya.

Di SMPN 5 Jogja status 'famili lain' bahkan memenuhi dalam satu kartu keluarga, kecuali status kepala keluarga. "Modus seperti ini tentu sangat merugikan calon siswa yang benar-benar merupakan asli warga setempat. Karena calon siswa harus tersingkir karena kalah dekat dengan calon siswa lain yang berstatus 'famili lain,' tambahnya. Kamba juga mengemuka-

kan, ada hal lain seperti jalur kemaslahatan guru yang dijadikan satu jalur dengan perpindahan orang tua. Menurutnya, tujuan dari jalur kemaslahatan guru menjadi pertanyaan dan harus dievaluasi.

"Karena ada anak guru ingin masuk ke sekolah negeri yang diinginkan dan orang tua bekerja di sekolah negeri. Namun kalah nilai dengan calon siswa jalur perpindahan orang tua," jelasnya.

Ia menambahkan, sebaiknya jalur kemaslahatan guru punya jalur tersendiri dan tidak dijadikan satu dengan perpindahan orang tua. Sebab, nantinya yang diadu adalah nilai sesama anak guru. Termasuk mempertimbangkan berapa lama guru mengabdikan di sekolah negeri itu.

"Artinya, meskipun guru itu sudah bekerja belasan bahkan puluhan tahun mengabdikan di sekolah dan memiliki anak kandung yang ingin sekolah negeri. Namun tidak diterima karena kalah nilai dengan casis dari jalur perpindahan ortu. Maka, harus ada kebijakan khusus dari Disdikpora Kota Jogja terkait hal ini," tuturnya.



DEMI ANAK: Ortu mengantar anaknya untuk mendaftar saat hari pertama PPDB jenjang SMP di SMPN 15, Kota Jogja, kemarin (19/6).

Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Pendidikan Disdikpora Kota Jogja Siti Hidayati menyebut, yang dimaksud penduduk kota adalah nama anak itu ada di KK tersebut.

"Kalau dia mau pindah KK itu, sudah menjadi hak dari orang tersebut. Sebab dari sisi aturan kependudukan, tidak ada aturannya. Mau status famili lain, status anak, atau cucu yang penting nama anak itu ada di KK itu," terangnya.

Untuk jalur kemaslahatan guru dan perpindahan orang tua, Siti menerangkan kedua

jalur itu sama statusnya. "Kalau memang nilai anak di sekolah itu kalah dengan siswa lain, otomatis karena ini sistemnya terbuka secara online, anak itu akan tersingkir," ungkapnya.

Menurut Siti, jika jalur kemaslahatan guru dan perpindahan orang tua dipisah, maka untuk menghitung secara keadilan akan sulit. "Kami kan tidak tahu berapa jumlahnya. Kalau hanya melihat presentasi, jangan-jangan nanti juga terjadi kekosongan di sekolah. Karena kami tidak tahu persis jumlahnya," tandas Siti. (cr2/laz/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005